



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : H. RANO KARNO
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 537431

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.255.300.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 2310 m <sup>2</sup> /141 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 735.300.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1482 m <sup>2</sup> /800 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000		
3. Tanah Seluas 130 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m <sup>2</sup> /403 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>784.900.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 327.600.000		
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 123.979.600		
3. MOBIL, MITSHUBISI PAJERO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 209.570.400		
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 123.750.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>195.053.704</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>675.000.000</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.017.189.295</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	140.000.000
Sub Total	Rp.	17.067.442.999
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.067.442.999

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.